

UPAYA PELESTARIAN SITU BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (Studi Kasus Situ Cipondoh Kota Tangerang)

Ina Helena Agustina*

Abstrak

Upaya pelestarian situ tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga adalah tanggung jawab masyarakat. Upaya-upaya "partisipasi" dari masyarakat perlu dirancang oleh pemerintah itu sendiri. Selain itu pelestarian situ akan sulit terlaksana manakala hanya didekati secara konsep fisik, karena itu perlu dibarengi dengan pengembangan partisipasi masyarakat.

Untuk itu maka perlu dibentuk struktur organisasi kelompok kerja antar pemerintah dan masyarakat yang ada di sekitar perairan situ maupun wilayah pengaliran situ tersebut sampai di tingkat unit RT dan RW, dengan cara melakukan : (1) Sosialisasi terhadap konsep pelestarian situ dan manfaatnya untuk kehidupan manusia, (2) Membuat kerangka kerja yang terencana.

Dalam melakukan pelestarian situ, perlu mempertimbangkan faktor-faktor (1) Menggabungkan ruang ekologis dengan ruang administratif dalam batas wilayah administrasi Rukun Tetangga (RT)/RW, (2) Membuat Perencanaan dalam suatu kerangka kerja, (3) Memberlakukan sistem penilaian yang transparan dengan pola incentive dan disincentive, (4) Memberlakukan Sistem Pengendalian dan pengawasan pembangunan

Kata Kunci : Partisipasi, Pelestarian Situ.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Telah lama orang beranggapan bahwa alam dengan lingkungannya dapat dan akan mengatur dengan sendirinya sehingga hubungan-hubungan antara manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan dengan lingkungan alamnya akan selalu berimbang. Namun rupanya anggapan ini mulai dipertanyakan, karena pola hubungan yang seimbang tersebut, sangat dipengaruhi oleh nilai,

* Ina Helena Agustina, Ir. MT., adalah Dosen tetap Program Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung.

sikap dan perilaku manusianya sebagai makhluk hidup yang dominan menguasai alam di muka bumi ini. Sehingga sekitar tahun 1960an masalah lingkungan hidup, kemudian menjadi gencar diperbincangkan orang, terutama oleh mereka yang menyatakan diri sebagai “pencinta lingkungan hidup”. Disusul dengan adanya Konferensi Internasional mengenai Lingkungan Hidup yang diadakan oleh PBB di Stockholm tahun 1972, yang mulai menyadari bahwa hidup manusia sangat tergantung pada keberlangsungan bumi ini. Kemudian KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 kata “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*) menjadi landasan bagi pembangunan di hampir semua negara di bumi ini, termasuk Indonesia. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana dapat membentuk suatu kondisi yang serasi antara lingkungan hidup dan kependudukan dalam suatu proses perubahan yang berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

Sejalan dengan itu, dalam pembangunan nasional telah diupayakan dua hal yang amat penting yaitu pengendalian kenaikan jumlah penduduk melalui program keluarga berencana dan transmigrasi, dan melalui program peningkatan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spirituil. Tampaknya pembangunan industri merupakan salah satu jalan yang mungkin ditempuh untuk memenuhi kebutuhan material dan spirituil masyarakat. Maka dalam 25 tahun mendatang peranan industri dan jasa dalam pembangunan terus meningkat melebihi sektor pertanian.

Bersamaan dengan hal ini penduduk daerah perkotaan akan lebih banyak jumlahnya. Penduduk perkotaan di Indonesia meningkat menjadi 155 juta orang (60% dari jumlah penduduk), dan dalam 25 tahun kedepan di Indonesia akan tumbuh 3 kota megapolitan, 9 kota metropolitan dan 12 kota besar baru. Selanjutnya diantisipasi bahwa 38 % penduduk kota di Indonesia akan tinggal di megapolitan dan metropolitan, 13 % di kota-kota besar, dan 48 % tinggal di kota-kota sedang dan kota-kota kecil (Herman Haeruman Js., 1997).

Persoalan di atas dihadapi pula oleh pertumbuhan kota-kota besar di Propinsi Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, seperti kota-kota di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek). Wilayah Jabotabek merupakan wilayah yang memiliki intensitas laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk sangat pesat, yaitu rata-rata $\pm 3,7\%$ laju pertumbuhan penduduknya. Untuk Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian wilayah Jabotabek, konversi lahan pertanian sawah ke lahan non pertanian (perumahan, industri, perkantoran dan lainnya) pada tahun 1990 hingga 1993, mencapai sebesar 873,83 ha/tahun (Iwan Kustiwan, 1997).

Upaya Pelestarian Situ Berbasis Partisipasi Masyarakat

(Studi Kasus Situ Cipondoh Kota Tangerang) (Ina Helena Agustina)

Pertumbuhan dan pembangunan kota tersebut pada akhirnya berekspansi ke wilayah sekitar situ-situ. Seperti yang terjadi di Kota Tangerang, dimana 5 buah situ dari 8 situ yang ada di Tangerang telah berubah fungsi menjadi perumahan, tanah daratan dan *fly over* (PU Pengairan Kota Tangerang Tahun 1999). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut yang memperlihatkan kondisi situ-situ yang ada di Kota Tangerang.

Tabel 1
Kondisi Situ Di Kota Tangerang Tahun 1999

No.	Nama Situ/Rawa	Desa	Kecamatan	Luas Awal (Ha)	Luas Akhir (Ha)	Fungsi
1	S. Cipondoh	Cipondoh	Cipondoh	142,0	126,0	Reservoar
2	R. Bulakan	Priuk	Jatiuwung	30,0	0	Reservoar
3	Situ Besar	Cikokol	Tangerang	6,8	4,8	Reservoar
4	R. Cangkring	Priuk	Jatiuwung	6,0	5,0	Reservoar
5	R. Kompeni	Benda	Benda	70,0	0	Reservoar
6	R. Plawad	Plawad	Jatiuwung	6,5	0	Reservoar
7	R. Kunciran	Kunciran	Cipondoh	3,0	0	Reservoar
8	Rawa Bojong	Kunciran	Cipondoh	6,0	0	Reservoar

Sumber : PU Pengairan Kota Tangerang, 1999.

Berdasarkan data di atas tampaknya situ-situ yang masih dapat diidentifikasi keberadaannya hanya 3 situ, yaitu Situ Besar, Situ Cipondoh dan Rawa Cangkring.

Secara teoritis keberadaan situ-situ (rawa-rawa) dalam suatu wilayah sangat potensial untuk menciptakan keseimbangan hidrologis/tata air permukaan dan air tanah. Karena keberadaannya merupakan suatu sub sistem dari suatu sistem ekologi lingkungan. Sementara ditinjau dari definisi ekosistem yaitu tatanan unsur-unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup, sehingga keberadaan situ-situ tersebut memegang peranan penting dalam mempertahankan keseimbangan iklim mikro dan ekosistem sekitarnya.

Demikian pula yang terjadi di Kota Tangerang dengan berkurangnya jumlah situ di Tangerang, hampir dapat dipastikan bahwa kawasan-kawasan situ yang berubah fungsi tersebut akan mengalami banjir tatkala musim hujan tiba. Apalagi keadaannya diperburuk dengan kondisi topografi yang relatif datar, sehingga air hujan tidak dapat cepat mengalir dan akhirnya potensial

menjadi daerah genangan banjir seluas \pm 180,5 Ha, tersebar di 49 titik lokasi, dengan tinggi genangan sekitar 0,3 –1,5 m, dan lama genangan sekitar 3 –12 jam (Buku Laporan Pelestarian Situ, 2000).

Menyadari sedemikian pentingnya keberadaan situ-situ tersebut, maka untuk mempertahankannya tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah dengan aspek legalitas yang tertuang dalam Inmendagri No.14 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Situ-situ. Tetapi perlu melibatkan semua unsur terkait. Di sini perlu disadari bahwa stakeholder pembangunan tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan swasta. Demikian pula untuk melestarikan situ-situ di Kota Tangerang.

Untuk melestarikan situ-situ tersebut sudah saatnya pemerintah melibatkan masyarakat. Untuk mengajak masyarakat (pemberdayaan), Ginandjar Kartasasmita (1996) mempunyai konsep sebagai berikut :

“*Pertama*, adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. *Kedua*, adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. *Ketiga*, adalah memberdayakan, yang juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya”.

Berdasarkan pemikiran di atas maka pertanyaan selanjutnya adalah “bagaimana bentuk pendekatan teknis pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian situ-situ tersebut?”, mengingat bahwa sejauh ini pemerintah belum melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian situ. Hal ini dapat dilihat selain secara fisik kondisi situ yang semakin “buruk” akibat pendangkalan oleh material yang terbawa oleh air hujan dan sampah yang dibuang seenaknya oleh masyarakat sekitar situ, juga dapat dilihat dari Buku Laporan Kemajuan Pelestarian Situ Kota Tangerang yang memperlihatkan bahwa 80% masyarakat yang diteliti tidak mengerti mengenai fungsi situ, kebersihan lingkungan dan juga menyatakan bahwa lembaga RT maupun RW belum berperan dalam kegiatan kebersihan situ. Dari pengamatan lapangan untuk membersihkan situ-situ dari tanaman liar masih ditangani oleh petugas PU pengairan dengan mengupah beberapa orang buruh. Usaha ini tampaknya belum optimal mengingat situ tersebut sangat luas dan proses

pengrusaknya relatif lebih cepat dibandingkan dengan upaya pelestariannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan di atas tampak bahwa penanganan masalah pelestarian situ yang hanya mengandalkan pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh instansi Dinas PU Pengairan) ternyata belum mampu untuk menyelesaikan masalah pelestarian situ itu sendiri. Untuk itu peran masyarakat dalam melestarikan situ menjadi faktor pertimbangan yang sangat penting. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah

1. Bagaimana pendekatan teknis pengembangan partisipasi masyarakat tersebut?
2. Faktor-faktor apa saja yang harus menjadi pertimbangan dalam untuk pelestarian Situ Cipondoh?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Membuat suatu pendekatan teknis untuk pengembangan partisipasi masyarakat;
2. Menentukan faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelestarian suatu Situ.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Konsep Partisipatif Masyarakat dan Birokrasi Pelestarian Situ

Partisipasi, menurut Uphoff dan Cohen, terdiri dari empat kegiatan, yaitu : membuat keputusan, pelaksanaan, memperoleh hasil (keuntungan) dan penilaian terhadap kegiatan (M. Munandar Sulaiman, 1998). Untuk Perdesaan kegiatan gotong royong seperti membangun WC umum telah mewujudkan kegiatan berbentuk partisipasi pembangunan. Saat ini model pembangunan dengan pendekatan partisipatif tumbuh sejalan dengan adanya “*reformasi*” yang telah mengubah semua paradigma kehidupan sosial-politik di Indonesia. Pada prinsipnya model partisipatif masyarakat ini adalah mencoba mewujudkan “kemandirian” masyarakat dalam pembangunan. Seperti yang diungkapkan Adimiharja dan Hikmat bahwa

“.....pendekatan partisipatif yang berakar pada pada pemberdayaan rakyat, pembangunan kini dimaknai sebagai realisasi

kerjasama setiap pihak dalam aspek dan tingkatan pembangunan seperti :

- a. Perumusan konsep*
 - b. Penyusunan model*
 - c. Proses Perencanaan*
 - d. Pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan*
 - e. Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan*
 - f. Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan ”*
- (Santi Indra Astuti,2001)

Menyimak tulisan diatas maka masyarakat di sini berperan sebagai subjek, bukan lagi hanya sebagai objek pembangunan. Dengan demikian pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator. Untuk itu dalam upaya pelestarian situ dengan kasusnya Situ Cipondoh, dimana fasilitatornya adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang, maka susunan organisasi kelompok kerja pengelolaan situ-situ di daerah Tangerang ditetapkan berdasarkan Inmendagri Nomor 14/1998. Untuk Kota Tangerang telah ditetapkan SK Walikota No.522.5/SK.132-LH/1998 mengenai Kelompok Pengendalian, Pemulihan dan Pelestarian Situ-situ, yang atas :

Koordinator : Walikota Kota Tangerang

Ketua : Ketua Bappeda Kota Tangerang

Sekretaris : Bagian Lingkungan Hidup Tingkat II

Anggota :

1. Kepala Cabang Dinas PU Pengairan Tangerang
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
3. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tangerang
4. Kepala Dinas Tata Kota Tangerang
5. Kepala Dinas Bangunan Kota Tangerang
6. Kepala Dinas Teknik Penyehatan Kota Tangerang
7. Kabag Hukum Setkotda Tangerang
8. Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Tangerang
9. Kepala Dinas Perumahan Kota Tangerang
10. Kabag Perkotaan Setkotda Tangerang
11. Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kota Tangerang
12. Camat Setempat, dan Lurah setempat.

Dalam realisasi pelaksanaan upaya pelestarian situ-situ tersebut, ternyata tidak dapat kalau hanya mengandalkan kelompok kerja di atas

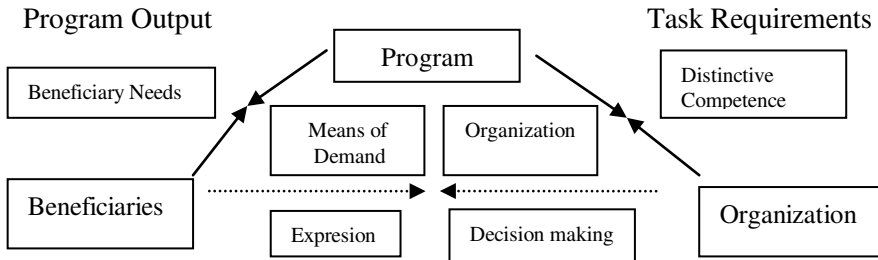
Upaya Pelestarian Situ Berbasis Partisipasi Masyarakat

(Studi Kasus Situ Cipondoh Kota Tangerang) (Ina Helena Agustina)

(pemerintah saja), tetapi perlu bersama-sama dengan masyarakat membentuk kelompok kerja. Di masyarakat kelompok kerja terdiri atas kelompok-kelompok mulai dari lingkup terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT), kemudian lingkup Rukun Warga (RW). Unit-unit kerja dalam lingkup RT maupun RW dapat menjadi kepanjangan tangan dari kelompok kerja pelestarian situ.

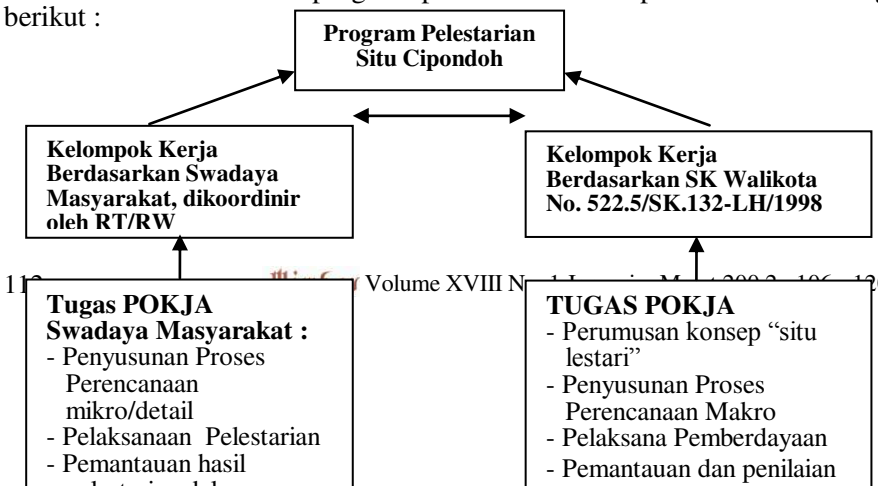
Untuk upaya peningkatan partisipasi masyarakat dapat disimak dengan menggunakan pendekatan konsep David Korten tentang “Three Way Fit” atau “Kesesuaian Tiga Arah” sebagai berikut (Gambar 1). Dalam diagram ini terlihat bahwa organisasi yang dalam hal ini adalah kelompok kerja sebagai dimensi kelembagaan yang harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan kebutuhan obyektif masyarakat dalam pelestarian situ menjadi keputusan organisasi untuk dapat memenuhi tuntutan program pelestarian situ tersebut. Sedangkan model pendekatan kemasyarakatannya adalah model lembaga swadaya. Model ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ideal *community development* yaitu swadaya, prakarsa dan kerjasama (Taliziduhu Ndraha,1990).

Gambar 1 : Model Kesesuaian



Sumber : Moeljarto Tjokrowinoto (1996)

Dari penjelasan diatas maka konsep partisipatif masyarakat yang dicoba ditawarkan dalam program pelestarian Situ Cipondoh adalah sebagai berikut :



2.2 Konsep Pelestarian Situ

Keberadaan suatu situ tidak dapat dilepaskan dari suatu sistem hidrologi dan ekologi lingkungan suatu wilayah, demikian pula dengan Situ Cipondoh. Keberadaan situ ini, sangat bergantung pada sistem hidrologi yang ada di wilayah sekitarnya. Untuk melakukan pelestarian Situ Cipondoh, perlu dilakukan upaya mempertahankan keberadaan situ tersebut, baik luas kawasan perairan situ maupun luas wilayah sekitarnya yang merupakan wilayah “*recharge*” atau pengisi situ tersebut.

Secara teoritis, keberadaan situ-situ dalam suatu wilayah sangat potensial untuk dapat menciptakan keseimbangan hidrologis/tata air permukaan dan air tanah dari suatu system ekologi lingkungan. Dalam skala regional potensi air tanah diperkirakan brelangsung melalui sejumlah besar peresapan air renik, aliran bawah (*base flow*) dan akuifer (Fakelmark, 1980). Secara alamiah dan dalam kurun waktu yang cukup panjang besar pelepasan air tanah setara dengan peresapannya. Karakter tersebut dipengaruhi selain oleh faktor-faktor hidrologi, geologi, dan meteorologi, juga dipengaruhi oleh luas peresapannya, kemiringan lapisan pembawa air, ketebalan tanah tertutup, tingkat kejenuhan air pada permukaan tanah, tingkat penguapan, intensitas curah hujan, sifat porositas, dan kelulusan pembawa air.

Fenomena alami berupa siklus hidrologi seperti yang terlihat pada gambar 2 berikut memberi gambaran bahwa ketersediaan sumber air tidak terpisah-pisahkan dan parameter-parameter hidrologi lingkungan satu sama lain saling berpengaruh dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan nyata dan masalah ketersediaan sumberdaya air. Kemudian sistem hidrologi lingkungan ini ditempatkan sebagai fenomena regional atau lokal untuk memperoleh jawaban operasional.

Gambar 2 : Daur Hidrologi

Diisi oleh "gambar2-inahelena.doc"

Dari gambar daur hidrologi dapat dibaca bahwa air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalami beberapa proses yang diantaranya : air hujan yang jatuh sebagian teresap oleh tumbuh-tumbuhan dan diuapkan kembali (transpirasi), sebagian menguap melalui pori-pori dalam tanah dan air permukaan (evaporasi), sebagian menjadi limpasan permukaan (surface run off), dan sebagian lagi kemungkinan tertahan menjadi air genangan (water retention). Secara umum persamaan neraca air dari Thorwhite, 1957 adalah sebagai berikut :

$$P = E_{vp} + D_{ro} + I_{nf}$$

Keterangan : P = Curah hujan tahunan rata-rata (mm/th)

D_{ro} = Aliran permukaan (mm/th)

E_{vp} = Evapotranspirasi (mm/th)

I_{nf} = peresapan (infiltrasi) (mm/th)

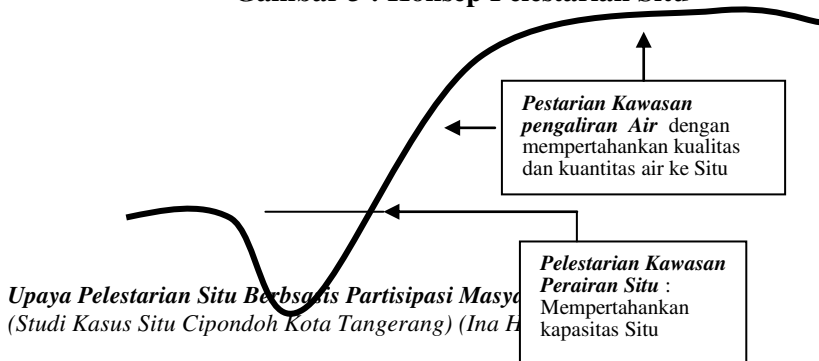
Faktor-faktor yang berhubungan dengan curah hujan adalah jenis presipitasi, intensitas curah hujan dan lamanya hujan, kapasitas infiltrasi, distribusi curah hujan pada daerah pengaliran, arah pergerakan curah hujan dan pengaliran, curah hujan terdahulu dan kelembaban tanah, serta kondisi

meteorologi. Sedangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan sifat-sifat daerah pengaliran adalah sebagai berikut :

1. Kondisi topografi pada daerah pengaliran akan sangat mempengaruhi air limpasan (*run off*);
2. Keadaan jenis tanah, bentuk dan butiran-butiran tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi dan memenuhi karakteristik air limpasan;
3. Kondisi penggunaan lahan (*land cover*), besar kecilnya volume air limpasan sangat dipengaruhi oleh penggunaan tanah;
4. Daerah pengaliran, jika semua faktor curah hujan itu tetap maka air limpasan tersebut selalu sama dan tidak tergantung pada daerah pengaliran, dengan asumsi bahwa aliran per satuan luas adalah tetap;
5. Keadaan dan karakteristik jaringan sungai, drainase alam atau drainase buatan lainnya.

Situ yang ada di Kota Tangerang merupakan situ yang keberadaannya berasal dari air hujan bukan dari mata air. Dengan demikian dalam proses pelestarian situ, agar situ tersebut tetap memiliki daerah tangkapan air maka daerah-daerah pengaliran air di sekitar Situ Cipondoh harus dipertahankan. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep pelestarian situ ini dapat dilihat gambar 3 berikut ini:

Gambar 3 : Konsep Pelestarian Situ



*Upaya Pelestarian Situ Berbasis Partisipasi Masyarakat
(Studi Kasus Situ Cipondoh Kota Tangerang) (Ina H...*

3 Pembahasan

3.1 Teknis Pengembangan Partisipasi Masyarakat Untuk

Pelestarian Situ Cipondoh

Bagaimanakah pendekatan teknis dalam upaya pengembangan partisipasi masyarakat untuk pelestarian Situ Cipondoh? Jawabannya adalah : (1) membuat konsep mengenai makna pelestarian Situ Cipondoh tersebut, selanjutnya konsep ini disosialisasikan kepada masyarakat setempat; (2) membuat kelompok kerja yang terencana untuk pelaksanaan kegiatan pelestarian Situ Cipondoh, mulai dari tingkat birokrasi pemerintah daerah sampai dengan ke tingkat unit-unit yang lebih kecil yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang dikoordinir melalui lembaga RT dan atau RW.

Dengan pendekatan analogi konsep hidrologi di atas, maka untuk melestarikan Situ Cipondoh, upaya pertama adalah dengan cara mempertahankan atau menjaga daerah tangkapan Situ Cipondoh dan daerah perairan situnya yang berdasarkan lingkup administratifnya, Situ Cipondoh terletak di Kecamatan Cipondoh meliputi Desa Cipondoh, Desa Kunciran, dan Desa Pinang. Tetapi berdasarkan penelitian ternyata wilayah tangkapan air (*catchment*) areanya tersebar meliputi wilayah Pinang seluas 82,3 Ha; wilayah Cipete seluas 408,7 Ha, dan wilayah Kunciran seluas 781,5 Ha.

Kondisi sekarang wilayah tangkapan air hujan tersebut telah ditumbuhi oleh perumahan-perumahan baru (lihat gambar 4) -- dan inilah yang menjadi salah satu penyebab berkurangnya kawasan perairan Situ Cipondoh -- padahal bila merujuk pada Permen PU No. 63/PRT/1993 dan Perda No. 8/1994 penetapan strategi untuk membatasi perkembangan pembangunan sekitar situ, telah dibuat dengan cara menetapkan garis-garis sempadan seperti yang terlihat pada gambar 4.1 dan 4.2 berikut.

Dalam kerangka kerja pelestarian Situ Cipondoh, perlu dibentuk kelompok kerja dalam unit-unit yang lebih kecil. Unit tersebut adalah Rukun Tetangga (RT) dan Pokja tersebut diketuai oleh Ketua RT. Pokja tersebut, kemudian secara bersama-sama dengan kelompok pengendalian dan pelestarian Situ Cipondoh yang ditetapkan oleh SK Walikota Tangerang. Dari pembentukan tim ini maka "dialog" diantara anggota tim dengan Pokja RT harus tercipta demokrasi dan persepsi yang sejalan agar "Pelestarian Situ Cipondoh" dapat terlaksana dengan lancar. Selanjutnya perlu penjelasan mengenai sistem ekologi lingkungan secara terbuka dengan merumuskan

kerangka kerja seperti yang tertuang pada tabel 2 di bawah ini. Perlu ditambahkan di sini, bahwa dalam beberapa studi telah dicoba dengan melakukan “internasilasi” masalah-masalah lingkungan sebagai bagian dari komponen biaya pelestarian, seperti misalnya terjadinya *degradasi* Situ Cipondoh oleh pihak-pihak pelanggar. Dan biaya untuk pelestarian, dapat diambil dari “pelanggar pelestarian situ” tersebut.

Gambar 4 : Sketsa diagramatik Situ Cipondoh)

Diisi oleh “*gambar4-inahelena.doc*”

Tabel 2
Rumusan Kerangka Kerja Pokja

Kegiatan	LOKASI WILAYAH PERAIRAN SITU(ZONING TIAP RT)			LOKASI WILAYAH PENGALIRAN AIR SITU(ZONING TIAP RT)			HASIL PENILAIAN TIM POKJA PEMDA*)
	Penang- gung Jawab Tim Pokja Pemda	Pelaksana adalah unit-unit RT	Waktu Pelaksa- naan Kegiatan Unit-unit RT	Penang- gung Jawab Tim Pokja Pemda	Pelaksana adalah unit-unit RT	Waktu Pelaks- anaan Kegiatan Unit-unit RT	

1. Pemahaman Konsep Pelestarian Situ Untuk Kehidupan Manusia dan kawasan "recharge"							
2. Pembersihan Saluran Drainase							
3. Pengawasan Terhadap kebersihan Saluran Drainase							
4. Penyaringan lumpur/partikel tanah di saluran drainase							
5. Pembuatan Sumur Resapan untuk Air hujan							
6. Pembersihan situ dari tanaman liar							
7. Menciptakan kegiatan Ekonomi dari perairan situ untuk masyarakat sekitar							

*) Hasil Penilaian ini duupayakan memberikan penghargaan kepada pelaksana kegiatan

3.2 Faktor-faktor Pertimbangan Pelestarian Situ

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelestarian Situ Cipondoh adalah :

1. *Menggabungkan Ruang Ekologis dan Ruang Administratif*

Batas administrasi umumnya tidak sama dengan batas ekologis. Untuk kebutuhan pelestarian situ seperti yang tertuang dalam Permen PU No. 63/PRT/1993 dan Perda No. 8/1994, maka batas ekologis dan batas ruang administrasi sebaiknya digabung. Batas ekologis ini sebaiknya dibagi ke

dalam batas administratif unit-unit RT (Rukun Tetangga). Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai wilayah "otorita pelestarian" suatu unit RT (Rukun Tetangga).

2. *Perencanaan dalam kerangka kerja*

Untuk melakukan pelestarian situ dengan mengembangkan partisipasi masyarakat harus memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan sasaran pelestarian yang dimaksud. Merujuk pada konsep pelestarian maka perlu dipertahankan kawasan perairan situ dan kawasan *upland area* sekitar situ yang merupakan "*catchment area* situ".

3. *Sistem Penilaian dari Pelaksanaan Kerangka Kerja*

Penilaian dari pelaksanaan pelestarian situ ini harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Selanjutnya dibuat sistem "*reward*" bagi yang berhasil dan "*denda*" bagi yang tidak melaksanakan. Atau dengan peristilahan lain menggunakan *system incentive* dan *disincentive*. Hal ini tentunya akan memacu masyarakat untuk melakukan kegiatan pelestarian dengan sebaik-baiknya.

4. *Sistem Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pembangunan Perumahan Baru*

Bagi pengembang-pengembang yang membangun di "kawasan pelestarian situ" maka Tim Pengendalian dan Pelestaria Situ harus melakukan pengawasan dan pengendalian secara tegas. Diberikan sistem insentif untuk pengembang yang menunjang pelestarian situ dan disincentif bagi yang tidak melakukannya.

4 Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pendekatan teknis untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian situ (khususnya Situ Cipondoh) adalah dengan melakukan : (1) Sosialisasi terhadap konsep pelestarian situ dan manfaatnya untuk kehidupan manusia (2) Membuat kerangka kerja yang terencana. Sementara untuk faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pelestarian situ adalah (1) Menggabungkan ruang ekologis dengan ruang administratif dalam batas wilayah administrasi rukun tetangga (2) Membuat perencanaan dalam suatu kerangka kerja (3) Memberlakukan sistem Penilaian yang transparan dari hasil kerja dan (4) Memberlakukan sistem pengendalian

dan pengawasan pembangunan perumahan baru dengan pola *incentive* dan *disincentive*.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Santi Indra, 2001, *Pendekatan Partisipatif Lewat Pemberdayaan Rakyat : Alternatif Bagi Pembangunan Berwawasan Otonomi Daerah*, Dalam Jurnal Mimbar No 2 Th XVII, LPPM UNISBA
- Djajadiningrat, Surna T, 1997, *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Jakarta, LP3ES,.
- Js, Herman Haeruman, 1997, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, Grasindo.
- Ndraha, Talizuduhu, 1990, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta,.
- Soelaiman, M. Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
-, 2000, *Buku Laporan Pelestarian Situ-situ Kota Tangerang*, Tangerang, Bappeda Kota Tangerang.